

**PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN BELANJA  
DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Syahri Zulkifli

NPP. 30.0910

Asdaf Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email: [syahri.z2211@gmail.com](mailto:syahri.z2211@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Anindita Primastuti, SE., ME.

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** Regional independence is one of the regional benchmarks in determining the prosperity of a region, therefore local governments need to increase PAD so that increasing regional independence. **Purpose:** This study aims to determine the ratio of regional independence and regional expenditure partially and simultaneously affects the financial performance of local governments in Ketapang Regency and finds efforts from local governments in increasing regional independence. **Method:** The research method used is a combination research method of sequential explanatory models characterized by data collection and quantitative data analysis in the first stage, and followed by qualitative data collection and analysis in the second stage to strengthen the results of quantitative research conducted in the first stage. This study uses descriptive statistical calculations and inferential statistics to examine the influence of variable X on variable Y. There are two variables X, namely X1 (level of regional independence) and X2, namely regional expenditure and variable Y, namely regional financial performance. The population in this study is the Budget Realization Report (LRA) of Ketapang District, West Kalimantan Province, with samples from 2016 to 2022. 7-year sampling was obtained through purposive sampling method. **Result:** The results of this study are: (a) Variable X1 has an effect of 0.065 on variable Y, with a unidirectional influence because the value of Beta coefficients shows a positive sign while the significance value of 0.788 (greater than 0.05) means there is no significant effect, (b) Variable X2 has an effect of -0.845 on variable Y, coefficient Beta shows a minus value which means that the effect is not in line with the significance value of 0.000 (smaller than 0.05) meaning that there is a significant influence, (c) Simultaneously variables X1 and X2 affect variable Y by 99.0%, (d) And efforts that can be made by local governments in increasing regional independence are by increasing revenue from Regional Taxes, Regional Levies and other legitimate receipts. **Conclusion:** Ketapang Regency is still far from being an independent region, therefore it is necessary to increase PAD by exploring existing sources of income.

Keyword : regional spending, regional independence, financial performance, local government

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** kemandirian daerah merupakan salah satu tolak ukur daerah dalam menentukan makmurnya suatu daerah, oleh karena itu pemerintah daerah perlu

meningkatkan PAD agar kemandirian daerah bisa meningkat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasio kemandirian daerah dan belanja daerah secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Ketapang serta menemukan upaya dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian daerah. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi model sequential explanatory dicirikan dengan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama, dan diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama. Penelitian ini menggunakan perhitungan statistik deskriptif dan statistik inferensial untuk menguji pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Terdapat dua variabel X yaitu X1 (tingkat kemandirian daerah) dan X2 yaitu belanja daerah dan variabel Y yaitu kinerja keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dengan sampel tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Pengambilan sampel 7 tahun diperoleh melalui metode *purposive sampling*. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penilitan ini yaitu: (a) Variabel X1 berpengaruh sebesar 0,065 terhadap variabel Y, dengan pengaruh yang searah karena nilai coefifisients Beta menunjukkan tanda positif sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,788 (lebih besar dari 0,05) artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan, (b) Variabel X2 berpengaruh sebesar -0,845 terhadap variabel Y, coefifisients Beta menunjukkan nilai minus yang berarti pengaruhnya tidak searah dengan nilai signifikansinya yaitu 0,000 (lebih kecil dari 0,05) artinya terjadi pengaruh yang signifikan, (c) Secara simultan Variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 99,0%, (d) Serta upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian daerah adalah dengan cara menambah penerimaan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. **Kesimpulan:** kabupaten ketapang masih jauh dari kata daerah yang mandiri oleh karena itu perlunya peningkatan PAD dengan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.

**Kata Kunci:** *belanja daerah, kemandirian daerah, kinerja keuangan, pemerintah daerah*

## I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Salah satu tugas yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan pengelolaan keuangan dengan tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pelaksanaan dari otonomi daerah adalah memberikan pemerintah daerah kebijakan untuk mengurus urusan pemerintahannya secara efektif agar terciptanya kemandirian daerah. Tanpa terkecuali setiap entitas pemerintah daerah wajib Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Djanegara,2017). Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kebijakan untuk membentuk daerah otonom tersebut, dengan adanya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri dengan tujuan daerah tersebut menjadi daerah mandiri, serta diharapkan dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut pemerintah daerah dapat memacu kesejahteraan hidup masyarakat dengan peningkatan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, membuat program desa untuk menciptakan masyarakat desa yang bisa bersaing dan sadar akan pentingnya kemajuan, mengatur jalannya kehidupan yang damai, harmonis dan taat hukum, membentuk budaya sosial yang kuat, serta meningkatkan kompetensi antar daerah yang baik. Adanya otonomi daerah tersebut menyebabkan pembangunan di daerah juga berkembang menyesuaikan dengan pembangunan pusat. Setiap daerah dituntut untuk memiliki Kemandirian daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang merupakan salah satu pelaku otonomi daerah memiliki upaya meningkatkan PAD agar bisa setara atau lebih besar dari pada Pendapatan Transfer dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah. Dengan adanya UU Nomor 1 tahun

2022 terkait Hubungan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sehingga di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dominan akan lebih banyak berasal dari pendapat daerahnya sendiri.

Indikator untuk melihat dan mengukur kemampuan otonomi daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai semua kebutuhan daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Daerah diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan otonomi daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang harus memiliki inisiatif dalam Menyusun dan membuat kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan serta dalam pembiayaan program pembangunan. Keberhasilan menggali sumber Pendapatan merupakan salah satu faktor untuk menentukan mandiriya suatu daerah.

Kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah diukur dari tingkat kemampuan keuangan dalam membiayai peyelenggaraan pemerintahannya, besarnya potensi daerah yang digali, rendahnya ketergantungan kepada pemerintah pusat, dan PAD dengan porsi yang lebih besar dalam membiayai pembangunan daerah. Walaupun demikian pemerintah daerah tidak sepenuhnya memiliki pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan daerahnya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Bantuan dana perimbangan juga diberikan melalui dana antara lain: Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah tersebut memiliki standar keberhasilan yang diukur melalui realisasi pendapatan asli daerah, yaitu apabila secara konsisten dari tahun ke tahun pendapatan asli daerah meningkat dan berbagai kebutuhan daerah dapat terpenuhi dan keefektivitasan daerah dalam menggali potensi daerah maka daerah tersebut telah memiliki kemampuan keuangan.

Kondisi keuangan pemerintah daerah dan kemampuan keuangan daerah dalam melakukan kinerjanya dapat diukur melalui kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan yang ada. Mardiasmo (2018) menyatakan "pengukuran kinerja (keuangan daerah) dilakukan untuk membantu kinerja pemerintah daerah, mengalokasikan sumber daya dan pengambilan keputusan, memperbaiki komunikasi kelembagaan, dan mewujudkan pertanggung jawaban publik". Mahmudi (2016) menyatakan "Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur menggunakan analisis rasio keuangan daerah". Rasio keuangan daerah yang dapat dipakai yaitu seperti Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Rasio Belanja Modal.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Pemerintah daerah Kabupaten Ketapang berusaha untuk meningkatkan PAD sehingga rasio kemandirian daerahnya bisa bertambah. Dengan demikian perlunya untuk mewujudkan kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dengan menata struktur penerimaan daerah. Minimnya penerimaan PAD merupakan hambatan yang besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang sehingga perlunya kesungguhan evaluasi oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat, karena target dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang kurang efektif dan efisien merupakan salah satu pangkal permasalahan yang membuat kurang tercapainya pendapatan daerah. Pemda Kabupaten Ketapang dalam mengatur penerimaan pendapatan daerahnya sudah bisa dibilang berhasil karena target yang ingin dicapai sudah terpenuhi, bahkan realisasinya melebihi anggaran yang telah ditargetkan.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu dalam konteks kinerja keuangan dan kemandirian daerah. Penelitian pertama oleh Shafira Ramadhia Utami dan Sulardi (2019) dengan judul *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan Rasio Kemandirian Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2019*. Hasil penelitian ini menunjukkan praktik pengungkapan pada laporan keuangan pemda Indonesia relatif rendah

dengan rata-rata 60,42%. Populasi dan IPM merupakan faktor penting yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemda, sedangkan opini audit dan rasio kemandirian tidak mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemda. Penelitian kedua oleh Periansya (2019) dengan judul *Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019*. Didalam penelitian ini dijelaskan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh terhadap kekayaan daerah dengan arah koefisien positif Sedangkan kemandirian keuangan daerah tidak memiliki pengaruh secara parsial dilihat dari Dana Bagi Hasil. Secara simultan, kemandirian daerah juga dipengaruhi oleh dana bagi hasil, kekayaan daerah, dan dana alokasi umum. Penelitian ketiga oleh Desi Susilawati, Linda Kusumawati Wardana dan Intan Fajar Rahmawati (2018) dengan judul *Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan : Studi Kasus BKAD Sleman pada tahun 2018*. Rata-rata kinerja keuangan BKAD Sleman dianalisis dan dilakukan pembahasan kemudian mendapatkan hasil yang sudah baik. Tingkat kemandirian pemda memiliki pola hubungan yang tergolong kurang yaitu sebesar 35,34%, namun tingkat efisien belanja daerah sudah cukup efisien yaitu sebesar 87,15%. Penelitian keempat oleh Arya Putra Supriyadi dan Fandi Ahmad (2019) dengan judul *Analisis Rasio Efektivitas PAD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Jakarta Periode 2015-2019*. Hasil penelitian dapat diketahui cara menghitung rasio Efektifitas Kota Jakarta dengan cara melakukan perhitungan realisasi Pendapatan dibagi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan target PAD yang ditempatkan berdasarkan potensi nyata pada daerah. Yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah dapat berupa pajak daerah, Pungutan daerah, keuntungan daerah, keuntungan dari pemanfaatan aset daerah yang dipisahkan dan PAD lainnya yang telah diatur.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengenai Pengaruh kemandirian keuangan daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten ketapang provinsi kalimantan barat. Pendekatan penelitian yang digunakan juga berbeda dari sebelumnya yaitu mix method dengan dengan model sequential explanatory oleh John W. Cresswel (2012).

#### **1.5 Tujuan**

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Rasio Kemandirian Daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah secara signifikan dan untuk mengetahui pengaruh Rasio Kemandirian Daerah dan Belanja Daerah secara simultan serta menganalisa upaya pemerintah daerah Kabupaten Ketapang dalam meningkatkan kemandirian daerah sehingga berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang.

## **II. METODE**

Pendekatan penelitian yang diterapkan pada penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (Mixed method). Mixed method bukan pendekatan baru dalam penelitian, mixed method merupakan penelitian yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan rancangan tujuan tertentu untuk menjawab tujuan dari penelitian. Penelitian mix method adalah suatu penelitian yang menggabungkan dua bentuk metode atau pendekatan dalam penelitian, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Desain yang dimiliki didalamnya yaitu dengan desain mix metode status sepadan. Metode ini peneliti menggunakan pendekatan Kuantitatif dan kualitatif dalam tingkat yang sama sehingga bisa memahami sebuah fenomena atau masalah yang sedang dikaji. Jenis penelitian yang diterapkan yaitu penelitian sequential explanatory. Creswell (2019) menyatakan “Metode penelitian kombinasi model sequential explanatory dicirikan dengan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama, dan diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama”.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan penelitian ini Teknik yang digunakan yaitu Regresi Linear Berganda, Uji Asumsi Klasik, Uji Kelayakan Model dan Uji Hipotesis yang dilakukan dengan cara menganalisis data *output* yang diperhitungkan menggunakan sebuah program computer yakni SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) for windows version 25.

#### 3.1 Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah (X1), secara terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Y) Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 1

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	182.726	3.674		49.737	.000
	RKD (X1)	.065	.227	.015	.288	.788
	PBD (X2)	-.845	.044	-1.006	-19.400	.000

a. Dependent Variable: KKD (Y)

Sumber: *Data BPKAD Kabupaten Ketapang diolah, 2023*

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 1 maka bisa dinyatakan bahwa nilai signifikansi Rasio Kemandirian Daerah lebih besar dari 0,05 yakni 0,788 yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan atas variabel X1 ( Rasio Kemandirian Daerah) terhadap variabel Y (kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang).

Data RKD dan KKD Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang membuktikan bahwa nilai rasio kemandirian yang tinggi tidak menentukan nilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang menjadi semakin tinggi juga karena berdasarkan analisis rasio kemandirian daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang dari tahun anggaran 2016-2022 memperlihatkan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian daerahnya maka semakin berkurang tingkat kinerja keuangan daerah di Kabupaten Ketapang. Hanya pada tahun 2021 diantara 7 tahun tersebut yang memperlihatkan bahwa nilai rasio kemandirian daerah yang tinggi akan membuat kinerja keuangan daerah semakin tinggi juga.

Berdasarkan hasil analisis dari RKD dan KKD Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang memiliki nilai rasio kemandirian yang rendah, maka nilai kinerja keuangannya menjadi tinggi, begitu juga sebaliknya semakin besar nilai rasio kemandirian daerahnya maka semakin tinggi pula nilai kinerja keuangan daerahnya. Nilai dan perbandingan dari rasio tersebut membuktikan bahwa Kabupaten Ketapang tidak mandiri serta kinerja keuangannya tidak efisien. Berdasarkan hasil penelitian ini pemerintah Kabupaten Ketapang memiliki nilai rasio kemandirian yang rendah, maka nilai kinerja keuangannya menjadi tinggi.

#### 3.2 Pengaruh Belanja Daerah (X2), secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Y) Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat

Pada pembahasan selanjutnya, berdasarkan uji hipotesis pada tabel 1 menyatakan bahwa belanja daerah (X2) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah (Y)

sebesar -845 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (kurang dari 0,05) yang berarti hubungan kedua variabel tersebut adalah berpengaruh secara signifikan.

Hasil penelitian dari tahun 2016-2022 mengartikan bahwa perubahan penurunan dan juga kenaikan pada jumlah belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dari segi kurang ataupun melebihi total pendapatan daerah akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang. Sebab semakin besar belanja yang dilakukan daerah yang besarnya melebihi total pendapatan daerah maka berdasarkan rumus efisiensi kinerja keuangan daerah dapat dikatakan hal tersebut kurang efisien, begitupun sebaliknya.

Hubungan yang berpengaruh itu dapat terjadi karena belanja yang dilakukan daerah berdampak kepada stabilitas keuangan daerah yang dimana hal tersebut berkaitan dengan pengelolaan APBD untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah.

### 3.3 Pengaruh Variabel Rasio Kemandirian Daerah (X1) dan Belanja Daerah (X2) secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Y) Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 2

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.997 <sup>a</sup>	.993	.990	.663
a. Predictors: (Constant), PBD (X2), RKD (X1)				
b. Dependent Variable: KKD (Y)				

Sumber: *Data BPKAD Kabupaten Ketapang diolah, 2023*

Berdasarkan nilai Adjusted R Square pada tabel di atas sebesar 0,990 yang berarti bahwa rasio kemandirian daerah (X1) dan Belanja Daerah (X2) memiliki pengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan daerah (Y) yakni sebesar 99% dan sisanya yaitu sebesar  $100\% - 99\% = 1\%$  merupakan variabel lain diluar penelitian ini yang menunjukkan jika masih terdapat pengaruh lain yang dapat memberi pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Ketapang.

### 3.4 Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam meningkatkan kemandirian daerah sehingga berdampak pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat

Dengan adanya kemandirian daerah yang tinggi maka bisa juga meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Ketapang menjadi lebih tinggi juga. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam meningkatkan kemandirian daerahnya adalah dengan menambah jumlah penerimaan daerah dari PAD, Retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah

Berdasarkan hasil wawancara penulis Bersama dengan sekretaris BPKAD, WAHYUDIN, SE., ME. , dalam meningkatkan pendapatan daerah bisa melalui PAD dengan melakukan intensifikasi pajak daerah, contohnya adalah dengan meningkatkan pajak daerah yang bisa ditingkatkan seperti PBB dengan cara meningkatkan NJOP dengan cara dinilai ulang oleh pemerintah daerah. Dari segi pendapatan retribusi yaitu bisa meningkatkan fasilitas dan pelayanan retribusi sehingga bisa meningkatkan penerimaan daerah.

Kabupaten ketapang telah bekerja sama dengan 4 perusahaan daerah yaitu Ketapang Mandiri, Pangan Mandiri, Energi Mandiri dan Bumi Mandiri. Kerja sama Pemerintah Daerah dengan perusahaan daerah merupakan penerimaan lain yang sah sehingga mendapatkan dividen dari perusahaan yang sekarang berada di Kabupaten Ketapang. Dari hasil wawancara tersebut penulis rasa masih kurang untuk menemukan upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah sehingga wawancara juga dilakukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, Drs. Pelealu Devi Frantito, M.M, M.Si, Berdasarkan UU No 28 tahun 2009 pajak kabupaten terdiri dari 11 pajak daerah. Sumbangan terbesar dari pajak daerah tersebut adalah berasal dari BPHTB. Untuk memperjelasnya maka penulis membuat rincian PAD Kabupaten Ketapan.

Rincian PAD pada tabel dibawah hanya sampai tahun 2021 karena tahun 2022 belum keluar hasil audited dari BPK. PAD terdapat 4 jenis yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari 11 pajak daerah tersebut, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak dengan penerimaan terbesar selama 6 tahun terakhir. Kita bisa melihat pada masa pandemi covid tahun 2019 dan 2020 BPHTB tersebut tetap memberikan sumbangan yang besar dalam penerimaan pajak daerah yaitu 59% pada tahun 2019 dan 64% pada tahun 2020. Dari 11 pajak daerah tersebut yang perlu dioptimalkan lagi adalah 10 pajak daerah tersebut. Maka dalam meningkatkan penerimaan tersebut diperlukan beberapa strategi sehingga 10 pajak daerah tersebut bisa meningkat, hal yang perlu dilakukan adalah dengan cara :

1. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah;
2. Menjalin Kerjasama dengan pihak swasta/LSM dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah;
3. Melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah;
4. Memperluas tax-base pajak daerah;
5. Menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah.

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber PAD yang potensial namun belum memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pembentukan APBD. Retribusi terdiri atas tiga golongan: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Ketiga golongan retribusi tersebutlah yang perlu ditingkatkan oleh daerah sesuai dengan potensi yang ada sehingga dapat meningkatkan PAD dan mengurangi tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Dalam kaitan tersebut, daerah harus melakukan analisis potensi yang ada maka kabupaten ketapang harus dapat memanfaatkan semaksimal mungkin demi kepentingan pembangunan daerah di kabupaten Ketapang. Pendapatan Retribusi Daerah terkecil adalah pada masa covid yaitu tahun 2019. Berdasarkan pengertiannya maka wajar saja jika banyak masyarakat yang tidak menggunakan jasa dari retribusi daerah pada masa covid karena banyaknya aktivitas yang berkurang.

**Tabel 4.19**  
**Rincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2016-2021**

No	Jenis PAD	Realisasi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1.</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>64.388.876.601</b>	<b>90.884.601</b>	<b>99.703.199.867</b>	<b>102.612.120</b>	<b>130.004.428.203</b>	<b>159.951.510.405</b>
a.	Pajak Hotel	1.631.843.243	1.564.744.065	2.130.041.535	2.066.951.313	1.276.242.881	2.348.841.959
b.	Pajak Restoran	1.575.780.652	1.496.117.898	2.082.618.021	3.475.842.347	6.599.374.459	7.073.626.025
c.	Pajak Hiburan	233.537.351	277.973.470	1.603.880.325	1.763.408.318	419.072.246	294.953.589
d.	Pajak Reklame	1.134.234.380	2.018.746.943	1.988.712.595	2.002.114.395	2.096.149.035	2.302.560.401
e.	Pajak Penerangan Jalan	10.201.458.331	13.105.732.027	15.361.373.867	16.852.026.093	17.690564.913	19.161.917.127
f.	Pajak Parkir	298.567.300	480.927.600	567.214.500	537.475.200	332.675.402	315.293.158
g.	Pajak Air Bawah Tanah	0	346.315.778	2.659.869.507	2.219.060.322	1.530.482.464	2.093.833.070
h.	Pajak Sarang Burung Walet	128.061.000	155.388.800	165.150.000	197.748.900	340.514.800	360.267.900
i.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.021.225.670	2.845.619.201	3.107.787.712	3.590.717.858	2.356.622.510	4.648.871.345
j.	Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan Perkotaan	5.478.047.584	6.000.992.112	8.259.648.828	8.104.189.081	7.764.8822.569	8.059.641.775
k.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	40.686.557.339	62.592.043.534	61.776.902.977	61.802.587.898	89.597.846.924	113.291.704.055
<b>2.</b>	<b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>7.177.733.530</b>	<b>9.738.648.185</b>	<b>9.905.237.079</b>	<b>5.858.936.620</b>	<b>9.389.663.336</b>	<b>7.629.754.815</b>
	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>2.226.018.220</b>	<b>2.168.429.260</b>	<b>2.278.226.638</b>	<b>2.727.224.400</b>	<b>2.873.700.829</b>	<b>1.004.502.850</b>
a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.552.664.600	1.739.503.100	1.998.106.798	2.419.383.000	201.280.000	172.309.000
b.	Retribusi Pelayanan persampahan	337.400.000	188.750.000	137.770.000	228.190.000	18.359.000	203.780.000
c.	Retribusi Pelayanan Parkir	17.548.000	13.567.000	13.270.000	16.715.000	10.500.000	21.591.000
d.	Retribusi Pelayanan Pasar	63.250.000	58.700.000	45.100.000	34.956.400	0	13.900.000
e.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	255.155.620	167.909.160	83.979.840	34.956.400	528.660.000	0
	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>1.101.572.125</b>	<b>1.036.812.234</b>	<b>1.073.779.425</b>	<b>9.69.492.471</b>	<b>586.633.675</b>	<b>938.291.041</b>
a.	Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	779.774.450	866.193.959	972.536.430	886.370.771	530.005.650	883.168.066
b.	Retribusi Tempat Pelangan	165.904.500	43.858.500	28.456.000	24.109.000	26.306.000	30.440.000
c.	Retribusi Terminal	7.851.000	6.118.000	4.227.000	3.465.000	3.535.000	2.520.000
d.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	8.600.000	9.000.000	8.400.000	5.900.000	300.000	0
e.	Retribusi Rumah Potong Hewan	91.125.000	86.800.000	42.500.000	31.550.000	13.050.000	5.200.000
f.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	26.367.175	24.841.775	17.659.995	18.097.700	13.437.025	16.962.975
g.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	21.950.000	0	0	0	0	0
	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>385.143.185</b>	<b>6.533.406.691</b>	<b>6.553.231.015</b>	<b>2.162.219.749</b>	<b>5.929.328.832</b>	<b>5.686.960.924</b>
a.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.385.348.835	5.992.367.641	6.077.323.015	1.163.815.069	3.601.879.032	4.699.532.300
b.	Retribusi Izin Gangguan	463.994.350	379.723.050	0	0	0	0
c.	Retribusi Izin Trayek	800.000	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>5.406.538.542</b>	<b>5.385.904.867</b>	<b>5.62.501.444</b>	<b>5.360.118.291</b>	<b>6.247.663.453</b>	<b>6.485.928.435</b>

a	Perusahaan Daerah PT. Ketapang Mandiri	17.238.603	0	0	50.000.000	67.000.000	120.000.000
b.	BUMD PT. Bank Kalbar	5.389.299.939	5.385.904.867	5.623.501.444	5.310.118.291	6.180.663.453	6.365.928.435
4.	Lain-lain PAD yang sah	57.624.616.890	62.034.177.244	75.124.769.724	83.667.291.473	85.641.531.177	116.937.085.064
a.	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	0	15.600.000	2.120.000	920.600.800	892.107.688	396.366.530
b.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	705.262.014	0	0	0	0	4.000.000
c.	Jasa Giro	7.611.684.301	5.334.299.598	6.608.283.109	6.259.542.588	7.691.941.366	11.268.091.361
d.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti kerugian Keuangan Daerah	956.601.566	896.050.815	2.687.444.718	2.478.016.053	782.702.005	4.695.758.349
e.	Penerimaan Komisi, potongan, atau bentuk lain	0	0	38.800.000	0	0	0
f.	Pendapatan denda atas Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	20.083.785	197.641.918	335.789.046	0	0	97.319.579
g.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	298.870.479	386.748.554	331.948.110	263.730.724	335.206.757	1.469.575.976
h.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0	7.668.783	0	0	0	0
i.	Pendapatan dari Pengembalian	0	58.500.000	0	23.060.000	0	215.435.175
j.	Pendapatan BLUD	29.627.486.249	37.606.957.499	47.567.165.238	54.432.453.287	56.497.295.176	89.917.670.616
k.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0	0	0	0	0	8.872.867.475
l.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan penjualan	99.740.000	47.077.000	0	0	0	0
m.	Pendapatan Lain-Lain	2.614.252.587	1.825.843.067	819.548.000	2.260.109.836	3.578.307.690	0
n.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	14.537.908.662	14.954.415.006	15.652.095.879	15.896.321.972	0	0
o.	Pendapatan Denda Administrasi			0		190.575.000	0

Sumber : Data BPKAD Kabupaten Ketapang diolah, 2023

Dari data 6 tahun tersebut bisa kita lihat bahwa penerimaan retribusi terbesar adalah retribusi izin mendirikan bangunan. Kegiatan mendirikan bangunan tidak bisa dilakukan setiap saat jadi kemungkinan besar jenis retribusi ini akan mengalami penurunan, contoh nyatanya adalah pada tahun 2019 penerimaan tersebut hanya 1.16 miliar saja, angka tersebut sangat jauh yaitu tiga sampai enam kali lipat lebih kecil dari tahun-tahun lainnya. Oleh karena itu perlunya peningkatan jenis retribusi lain di Kabupaten Ketapang karena manfaat lain dari retribusi adalah sebagai stabilitas ekonomi daerah yaitu mengendalikan harga pasar dan juga dapat membukakan lapangan kerja baru dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam meningkatkan retribusi daerah melakukan strategi intensifikasi adalah berusaha semaksimal mungkin melakukan penagihan atau pungutan terhadap jenis-jenis retribusi yang ada. Kewenangan memungut retribusi kepada wajib retribusi berdasarkan perda yang ada diserahkan kepada SKPD sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Objek pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri atas bagian laba penyertaan modal pada BUMD dan bagian laba

atas penyertaan modal pada perusahaan swasta. BUMD dan perusahaan yang terdapat di Kabupaten Ketapang yaitu :

1. Perusahaan Daerah PT Ketapang Mandiri
2. BUMD PT BPD Kalbar
3. PDAM Tirta Pawan
4. PT Jamkrida Kalbar
5. BUMD PT Ketapang Pangan Mandiri
6. BUMD PT Ketapang Energi Mandiri

Namun yang telah memberikan laba atas penyertaan modal/investasi kepada daerah pada tahun 2016-2021 hanya dua yaitu Perusahaan Daerah PT Ketapang Mandiri dan BUMD PT BPD Kalbar. Bisa kita lihat dari tabel diatas bahwa bank Kalbar memberikan sumbangan terbesar dan Perusahaan daerah PT Ketapang mandiri memberikan sumbangan yang sangat kecil. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pada tahun 2017 dan 2018 penerimaan ketapang mandiri kosong, karena berdasarkan berita dari KETAPANGNEWS.COM pada tanggal 30 November 2017, Bupati ketapang, Martin Rantan, SH. M. Sos meminta pihak terkait untuk menonaktifkan pimpinan PT Ketapang mandiri. Hal tersebut disampaikan Bupati pada forum resmi dalam kegiatan Lokakarya Bidang Ekonomi Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkup Pemerintah Kabupaten Ketapang, di aula Kantor Bupati Ketapang.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Ketapang mengetahui kalau pimpinan PT Ketapang Mandiri tidak hadir dan beliau langsung memerintahkan untuk menonaktifkan pimpinan ketapang mandiri tersebut. Bupati ketapang dengan mengevaluasi kinerja ketapang mandiri sehingga penerimaan pada 2 tahun tersebut kosong. Evaluasi tersebut memang harus dilakukan karena ironisnya BUMD yang baru beralih dari status CV menjadi PT itu hanya mendapatkan keuntungan 17 juta pertahun. Selanjutnya, dari 6 BUMD/Perusahaan penyertaan modal dikabupaten ketapang, pemerintah harus lebih cepat bertindak sehingga semua BUMD/Perusahaan di Kabupaten Ketapang bisa memberikan keuntungan yang maksimal.

Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari; (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Dari data 6 tahun tersebut penerimaan terbesar didapat dari Badan Layanan Umum Daerah. BLUD dikabupaten ketapang tersebut adalah BLU RSUD dr.Agoesdjam. Keuntungan dari BLUD ini adalah dapat merekrut tenaga kerja sendiri selama dana yang dibutuhkan tersedia tanpa harus melalui dinas Kesehatan seperti sebelumnya. Selain itu beban pemerintah bisa berkurang karena dana publik yang diyakini oleh BLUD ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jadi dari ke empat jenis PAD pada tabel diatas, pajak daerah merupakan sumber penerimaan terbesar PAD. Peran pemerintah masih kurang dalam meningkatkan PAD oleh karena itu perlunya kesadaran dari masyarakat sehingga PAD bisa terus meningkatnya dan menyebabkan kurangnya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

#### IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Rasio kemandirian daerah (X1) dari hasil perhitungan SPSS menunjukkan koefisien Beta sebesar 0,015 pada tingkat signifikansi 0,788, karena tingkat 0,788 lebih besar dari pada 0,05 hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah (Y) yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang dengan besaran pengaruh sebesar -0,065, tanda minus artinya terdapat pengaruh hubungan searah. Hal ini mengidentifikasikan bahwa semakin tinggi nilai rasio tingkat kemandirian pemerintah daerah maka semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah daerah. Dan rasio kemandirian daerah Kabupaten Ketapang belum dalam meningkatkan kinerja keuangannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingginya rasio kemandirian daerah yang dilihat dari persentase nilai rasio kemandirian daerah belum mampu membuat peningkatan pada nilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang.
- 2) Belanja daerah (X2) menunjukkan coefficients Beta - 19,400 pada tingkat signifikansi 0,000, karena 0,000 kurang dari 0,05 maka hal ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang dengan pengaruh sebesar -0,847, tanda minus artinya terdapat pengaruh hubungan yang tidak searah. Ini dapat diartikan berdasarkan hasil penelitian bahwa pemerintah Kabupaten Ketapang yang nilai rasio pengelolaan belanja daerahnya yang tinggi, maka nilai kinerja keuangan pemerintah daerahnya menjadi rendah, dan semakin kecil nilai rasio pengelolaan belanja daerahnya maka semakin tinggi pula nilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Ketapang tidak efektif dalam mengelola belanja daerahnya.
- 3) Secara simultan/bersama Rasio Kemandirian Daerah (X1) dan Belanja Daerah (X2) berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah (Y) Kabupaten Ketapang dengan pengaruh sebesar 99,0%.
- 4) Berdasarkan pembahasan tersebut maka diperlukan penyesuaian intensifikasi Pendapatan Asli Daerah, memberikan pelayanan yang terus ditingkatkan serta melakukan pendataan dan pendaftaran wajib pajak yang belum terdata dengan turun langsung kelapangan untuk mencari potensi apa saja objek pajak yang belum tergali sehingga kemandirian daerah Kabupaten Ketapang terus meningkat.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penelitian ini terutama kepada kepala BPKAD beserta jajarannya karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian

#### VI DAFTAR PUSTAKA

- Ariadi, W. (2021). *Manajemen Belanja Daerah Dalam Konsep Dan Analisis* . Sleman: CV Budi Utama.
- Badudu dan Zain. (2001). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design Qualitative , Quantitative, and Mixed Methods*

- Approaches. Los Angeles: Sage Publications Inc..
- Djanegara, M. S. (2017). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bogor: Kesatuan Press.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 . Semarang: Badan Penerbit.
- Hugiono dan Poerwantana. (2000). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Louis, G. (2000). *Mengerti Sejarah*. Depok: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Mahmudi. (2018). Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Erlangga.
- Moenek, Suwanda dan Rachmat. (2020). *Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Patarai, M. I. (2016). Kinerja Keuangan Daerah. Makasar: A. Emil Mattotorang.
- Sinurat, M. (2017). Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabet.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R%D. Bandung: PT. Alfabet.
- Widiyanto. (2013). *Statistika Terapan Konsep Dan Aplikasi Dalam Penelitian Bidang Pendidikan, Psikologi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Arya Putra Supriyadi dan Fandi Ahmad. (2021). Analisis Rasio Efektivitas PAD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Jakarta Periode 2015-2019. Vol 8 No. 1.
- Desi Susilawati, L. K. (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. Vol 1 No 2 Hal 91-99.
- Periansya. (2019). Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. Vol.05. No.02.
- Shafira Ramadhia Utami dan Sulardi. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit, Dan Rasio Kemandirian Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Vol. 19 No.2 253-263.



